



PERPUSTAKAAN RISET BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kasus Bond Pelindo II

Laporan BPK Belum Ditindaklanjuti KPK maupun Kepolisian

HASIL audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan penerbitan global bond yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 741 miliar.

"(Laporan) audit investigatif ini sudah diserahkan kepada KPK dan kepolisian, serta kepada Presiden," ujar Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka pada Desember 2019.

Dua lembaga penegak hukum yang menerima hasil audit BPK hingga kini belum melakukan pengusutan atas kerugian negara ini. Dalihnya masih diteliti.

"Ada tahapan yang harus dilaksanakan dalam menyikapi audit BPK. Kita koordinasi dengan lembaga terkait lebih dahulu," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Sikap yang sama disampaikan Juru Bicara Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono. "Nanti akan dilihat, sudah sejauh mana verifikasi datanya lebih dulu," kata Kepala Divisi Humas Polri itu.

Sebelumnya, Elvyn G Masassya saat menjabat Dirut Pelindo II menganggap penerbitan global bond untuk menarik dana ini tidak tepat. "Memang saya akui, sayang sekali jika harus bayar Rp 1 triliun per tahun untuk bayar bunga *global*

bond," keluhnya.

Dalam prospektus *global bond* Pelindo II, Elvyn menilai, beberapa proyek yang akan digarap mencapai nominal Rp 21 triliun masih dalam kajian. Dia tak bisa menjawab kenapa penarikan dana global bond begitu besar, namun proyek masih belum siap. Ini dilakukan di era sebelumnya.

"Maaf tanpa bermaksud apa-apa, jika ditanyakan kenapa harus ada penarikan global bond, kami tidak tahu," elaknya.

Penerbitan *bond* itu membebani perusahaan lantaran harus membayar bunga. "Beban bunga ini sangat besar. Kami melakukan mitigasi risiko dengan beberapa langkah meliputi menukarkan *bond* dengan rupiah untuk meringankan bunga dan membeli beberapa instrumen finansial serta melakukan *buy back*," bebernyanya.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya menilai, Direksi Pelindo II dianggap tidak melakukan perencanaan matang dalam menerbitkan surat utang. Akibatnya, perseroan harus menanggung beban bunga Rp 1 triliun per tahun.

"Kami masih melakukan investigasi untuk mendalami peran direksi dalam dugaan kejahatan korporasi ini," katanya. ■ GPG